

MENCEGAH KORUPSI DI TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN MELALUI PENINGKATAN PROFESIONALISME DAN MODERNISASI PENGADAAN



Disampaikan dalam Kegiatan Sosialisasi Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 8 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah (SIPLah)
Bogor, 10-13 November 2020

Latar Belakang

- Komitmen dan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi selalu menjadi prioritas pemerintah
- Upaya pencegahan korupsi belum bersinergi sehingga perlu konsolidasi dan aksi bersama antara kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya
- Karena belum bersinergi optimal, diperlukan **STRATEGI NASIONAL** yang lebih terfokus, terukur, dan berdampak

Tujuan

- Memberikan arahan tentang upaya strategis yang perlu dilakukan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya
- Mendorong program pencegahan korupsi yang berorientasi pada hasil (*outcome*) dan dampak (*impact*) bukan hanya luaran kegiatan (*output*) dengan capaian yang terukur; dan
- Meningkatkan sinergi antara program pencegahan korupsi dengan kebijakan pemerintah pusat

Pencegahan korupsi
menjadi

TERFOKUS

TERUKUR

BERDAMPAK



**TENTANG STRATEGI NASIONAL
PENCEGAHAN KORUPSI**

STRANAS PK

TIM NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI (TIMNAS PK)

KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi



Kementerian
Dalam Negeri



Kementerian
PAN & RB



Kementerian PPN/
Bappenas



KANTOR STAF PRESIDEN

TUGAS:

- Koordinasi, sinkronisasi & Monev Stranas PK
- Laporan
- Mempublikasikan pada masyarakat

SURAT KEPUTUSAN BERSAMA (SKB)

Tanggal 19 Oktober 2018

Lampiran : Aksi-aksi Pencegahan Korupsi



Sekretariat Nasional PK (SETNAS PK)

- TA Cegah Korupsi
- TA Monev



Kondisi Eksisting PBJ

3 FOKUS

11 AKSI

1 PERIJINAN & TATA NIAGA

- 1 Peningkatan Pelayanan dan Kepatuhan Perizinan dan Penanaman Modal ⚙️
- 2 Perbaiki Tata Kelola Data dan Kepatuhan Sektor Ekstraktif, Kehutanan, dan Perkebunan ⚙️⚙️
- 3 Utilisasi Nomor Induk Kependudukan untuk Perbaiki Tata Kelola Pemberian Bantuan Sosial dan Subsidi ⚙️
- 4 Integrasi dan Sinkronisasi Data Impor Pangan Strategis ⚙️
- 5 Penerapan Manajemen Anti Suap di Pemerintah dan Sektor Swasta ⚙️

2 KEUANGAN NEGARA

- 6 Integrasi Sistem Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Elektronik ⚙️
- 7 Peningkatan profesionalitas dan modernisasi Pengadaan Barang dan Jasa ⚙️⚙️
- 8 Optimalisasi Penerimaan Negara dari Penerimaan Pajak dan Non-Pajak ⚙️

3 PENEGAKAN HUKUM & REFORMASI BIROKRASI

- 9 Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi ⚙️⚙️
- 10 Implementasi Grand Design Strategi Pengawasan Keuangan Desa ⚙️
- 11 Perbaiki Tata Kelola Sistem Peradilan Pidana ⚙️

⚙️ Aksi di K/L sebagai PJ

⚙️ Aksi di Daerah sebagai PJ

TANTANGAN



Proses Pengadaan memerlukan waktu terlalu lama dan prosedur yang panjang

Barang Yang Dihasilkan Terlalu Mahal dan Bermutu Rendah. Tidak Sesuai dengan Spesifikasi Teknisnya, Sering Terkendala Ketersediaan Barang

Banyak Penyedia Tidak Profesional, Belum Teruji Kemampuannya, dan Tidak Akuntabel

Banyak Intervensi baik dari Internal dan Eksternal seperti Pengaruh atau Tekanan Politik.

PENYALAHGUNAAN WEWENANG (ABUSE OF POWER) dan PERSEKONGKOLAN /NEPOTISME

STATISTIK TIPIKOR



Perkara	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Jumlah
Pengadaan Barang/Jasa	2	12	8	14	18	16	16	10	8	9	15	14	14	15	17	188
Perijinan	0	0	5	1	3	1	0	0	0	3	5	1	1	2	1	23
Penyuapan	0	7	2	4	13	12	19	25	34	50	20	38	79	93	168	564
Pungutan	0	0	7	2	3	0	0	0	0	1	6	1	1	0	4	25
Penyalahgunaan Anggaran	0	0	5	3	10	8	5	4	3	0	4	2	1	1	0	46
TPPU	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	5	1	3	8	6	31
Merintang Proses KPK	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	0	0	2	3	10
Jumlah	2	19	27	24	47	37	40	39	48	70	58	57	99	121	199	887

ARAH PERBAIKAN : PENINGKATAN PROFESIONALISME DAN MODERNISASI PENGADAAN



TENDER KONVENSIONAL
akan ditinggalkan dan
beralih ke

ELEKTRONIK KATALOG:
NOSIONAL, SEKTORAL, LOKAL
dan Aplikasi Belanja Langsung
(BELA) LKPP , PADI Kemen
BUMN, SIPLah Kemendikbud,
dll



Kerjasama e-MARKETPLACE;
seperti EMBIZMARKET,
ONLINE SHOPP BLIBLI,
BUKALAPAK, SHOPPE, ALKES
PINTAR DLL

TENDER UMUM HANYA
DILAKUKAN UNTUK
PEKERJAAN KONSTRUKSI
ATAU BARANG KHUSUS

APA YANG MAU DITUJU



MUDAH

Full Kompetisi, Semua punya kesempatan yang sama (persaingan sehat)

CEPAT

Full Kompetisi, Semua punya kesempatan yang sama (persaingan sehat)

AMAN dan AKUNTABEL

Full Kompetisi, Semua punya kesempatan yang sama (persaingan sehat)

Pengadaan Yang Cepat, Mudah, Aman dan Akuntabel bisa diwujudkan dengan menggunakan

Full Kompetisi, Semua punya kesempatan yang sama (persaingan sehat)

sistem **Elektronik Katalog** dan **Marketplace**

Full Kompetisi, Semua punya kesempatan yang sama (persaingan sehat)

Beberapa Bentuk Korupsi di Satdik

Penyalahgunaan Dana BOS maupun pungutan dari orang tua peserta didik

Pengadaan barang dan jasa di sekolah yang tidak sesuai aturan

Suap yang dilakukan oleh orang tua kepada sekolah, kepala sekolah maupun guru dan /atau tenaga kependidikan lainnya

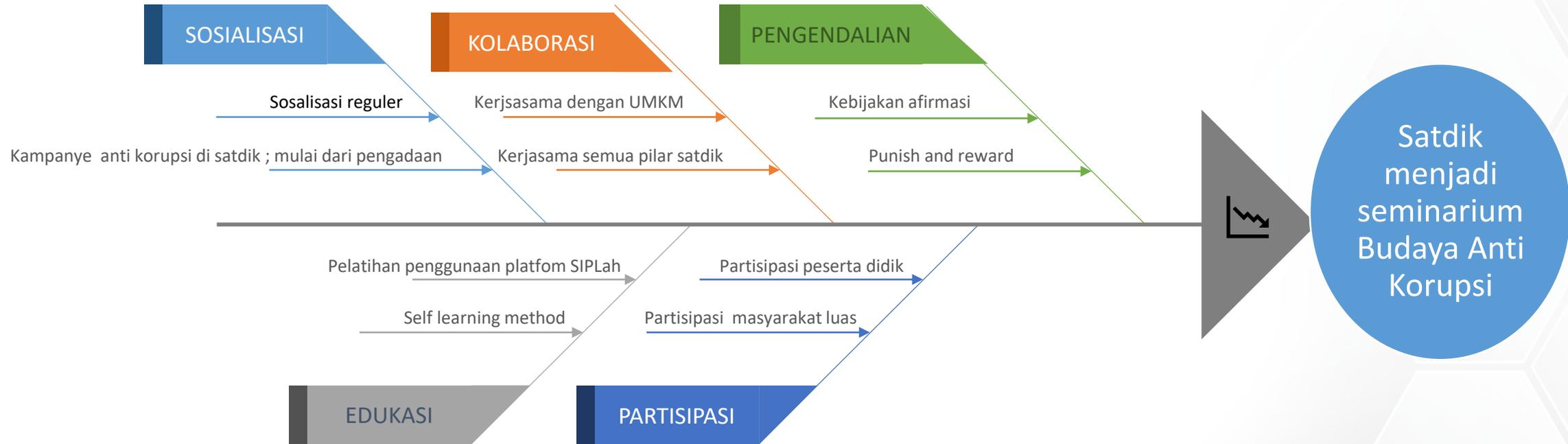
Gratifikasi dari orang tua murid kepada guru, dan atau wali kelas

Pungli dan/atau pemerasan pada saat PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru)

<https://nasional.kompas.com/read/2016/05/17/22084241/ini.lima.aktivitas.korupsi.yang.um.um.terjadi.di.tingkat.sekolah.?>



APA YANG PERLU DILAKUKAN





KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi



Kementerian
Dalam Negeri



Kementerian
PAN & RB



Kementerian PPN/
Bappenas



KANTOR STAF PRESIDEN

Sekretariat Nasional Pencegahan Korupsi (SETNAS PK)



Gedung Merah Putih KPK
Jl. Kuningan Persada No.4,
Setiabudi, Jakarta – Indonesia



021-25578300 ext. 8104



<https://stranaspk.kpk.go.id>

